

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait determinan kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penduduk di wilayah perdesaan lebih banyak yang memiliki jaminan kesehatan dengan proporsi 68,7% dibandingkan dengan yang tidak memiliki (31,3%), lebih tinggi pada kelompok usia 15-64 tahun (72,8%), jenis kelamin laki-laki (50,3%), status kawin (48,3%), pendidikan rendah (71,2%), tidak bekerja (57,4%), dan status ekonomi menengah atas (27,4%). Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki penduduk perdesaan adalah BPJS PBI (49,6%). Namun, terdapat kabupaten dengan proporsi penduduk tanpa jaminan kesehatan yang cukup tinggi, terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai (47,1%), Kabupaten Solok (44,5%), dan Kabupaten Sijunjung (44,2%).
2. Usia memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat ( $p\text{-value}=0,000$ ). Penduduk dengan kelompok usia 15-64 tahun lebih berpeluang memiliki jaminan kesehatan.
3. Jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan ( $p\text{-value}=0,363$ ).
4. Status perkawinan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat ( $p\text{-value}=0,000$ ). Penduduk yang dengan status kawin lebih berpeluang memiliki jaminan kesehatan.

5. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat ( $p$ -value=0,000). Penduduk yang berpendidikan tinggi lebih berpeluang memiliki jaminan kesehatan.
6. Status Pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat ( $p$ -value=0,000). Penduduk yang bekerja pada sektor formal lebih berpeluang memiliki jaminan kesehatan.
7. Status ekonomi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat ( $p$ -value=0,345).
8. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perdesaan Provinsi Sumatera Barat yaitu status pekerjaan informal (POR = 3,782).

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Bagi Kementerian Kesehatan**

Disarankan kepada Kementerian Kesehatan RI dan beberapa lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan dan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi penduduk khususnya kepada pekerja informal di wilayah perdesaan dalam program jaminan kesehatan agar meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **6.2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS)**

Disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat melakukan pendataan dan identifikasi penduduk dengan tepat, serta mendata penerima bantuan kesehatan agar tepat sasaran.

## **6.2.2 Kelompok Tani dan Koperasi**

Kelompok tani dapat mengadakan pertemuan rutin bulannya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya jaminan kesehatan yang mengundang petugas BPJS untuk memberikan penjelasan langsung yang mudah dipahami petani. Selain itu, kelompok tani dapat berperan sebagai fasilitator dengan mengumpulkan data anggota yang belum memiliki jaminan kesehatan dan membantu melengkapi dokumen yang diperlukan, serta mengembangkan sistem pembayaran iuran berkelompok melalui mekanisme arisan atau simpan pinjam yang disesuaikan dengan siklus panen petani. Koperasi dapat mengintegrasikan program jaminan kesehatan ke dalam paket kesejahteraan anggota dengan memberikan subsidi iuran BPJS dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

## **6.2.3 Bagi Penyelenggara Asuransi Kesehatan**

BPJS Kesehatan perlu memperkuat kebijakan yang mempermudah pendaftaran jaminan kesehatan bagi anak, seperti saat pendataan dan pencatatan Kartu Keluarga (KK). BPJS Kesehatan dapat mengintegrasikan skema kepesertaan iuran kedalam skema PBI sesuai dengan ketentuan, sehingga pekerja informal yang kesulitan dalam pembayaran iuran bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dapat melakukan penguatan sistem pendataan dan identifikasi masyarakat khususnya daerah terpencil dan pedalaman yang memiliki akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan, khususnya di 3 kabupaten dengan persentase penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan tertinggi yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung.

## **6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mempertimbangkan variabel lain yang mungkin relevan dan berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan kesehatan,

seperti akses terhadap fasilitas layanan kesehatan. Peneliti diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan dengan membandingkan berdasarkan jenis kepesertaan, seperti PBI, Non-PBI, dan asuransi swasta atau asuransi perusahaan. Selain itu, penelitian juga perlu difokuskan pada kelompok pekerja informal di wilayah perdesaan Sumatera Barat, mengingat kelompok ini merupakan faktor yang paling dominan dalam kepemilikan jaminan kesehatan.

